



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-689/PB/2020 18 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Juli sampai dengan November 2020

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sesuai daftar terlampir

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka rekonsiliasi eksternal periode bulan Juli hingga November 2020, proses *upload* ADK pada Aplikasi e-Rekon&LK dapat mengakibatkan perubahan data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Semester I tahun 2020. Oleh karena itu, mohon seluruh UAKPA/B, UAPPA/B-W, UAPA/B-E1 dan UAPA/B telah mengunduh seluruh Laporan Keuangan Semester I tahun 2020 yang diperlukan dari Aplikasi e-Rekon&LK.
2. Kementerian Negara/Lembaga yang membutuhkan *backup database* e-Rekon&LK atas LKKL Semester I tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dapat menyampaikan surat permintaan ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA/Satuan Kerja dengan KPPN untuk periode bulan Juli sampai dengan November 2020 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

Periode	<i>Open period upload ke e-Rekon&amp;LK</i>	Periode penyelesaian rekonsiliasi	Batas waktu status "Menunggu TTD KPA" tidak kena sanksi	TMT pengenaan sanksi	<i>Closed period upload ke e-Rekon&amp;LK</i>	<i>Open period upload ke e-Rekon&amp;LK</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Juli 2020	19 - 27 Agustus 2020	19 - 28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	29 - 31 Agustus 2020
Agustus 2020	1 - 11 September 2020	3 - 14 September 2020	14 September 2020	14 September 2020	12 - 14 September 2020	15 - 29 September 2020
September 2020 (Triwulan III)	1 - 12 Oktober 2020	5 - 14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	13 - 14 Oktober 2020	15 - 30 Oktober 2020
Oktober 2020	12 - 20 November 2020	16 - 23 November 2020	23 November 2020	23 November 2020	21 - 23 November 2020	24 - 29 November 2020
November 2020	1 - 11 Desember 2020	3 - 14 Desember 2020	14 Desember 2020	14 Desember 2020	12 - 14 Desember 2020	15 - 30 Desember 2020

4. Pengenaan sanksi akan diberikan apabila satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada Aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status "menunggu TTD KPA") sampai dengan batas waktu yang diatur sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kolom (3). Pengenaan sanksi dihitung mulai tanggal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kolom (4).
5. Dalam rangka menyelesaikan sanksi rekonsiliasi dan perbaikan data laporan keuangan, periode *upload* ADK bulan berkenaan ke Aplikasi e-Rekon&LK akan dibuka kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kolom (6). Pengenaan sanksi bulan berkenaan otomatis gugur apabila telah terbit BAR pada bulan berikutnya.
6. Dalam hal satker telah memperoleh BAR (status "BAR siap download") dan akan melakukan *upload* ulang ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK, agar terlebih dahulu mengajukan permohonan reset BAR ke KPPN. Pengajuan reset BAR dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* KPA, selanjutnya satuan kerja menyampaikan informasi permohonan reset BAR ke KPPN melalui sarana tercepat.
7. Rekonsiliasi TDK Segmen COA merupakan syarat terbitnya BAR, kecuali perbedaan tanggal dan dokumen DIPA serta TDK segmen COA akun kas BLU.
8. Satker *inaktif* yang telah menyelesaikan likuidasi (atau disebut "satker inaktif tidak bersaldo" di aplikasi e-Rekon&LK) sesuai PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Pada K/L, tidak diwajibkan melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN. Sementara bagi satker inaktif bersaldo tidak diwajibkan melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN, namun tetap melaksanakan *upload* ADK sampai dengan status satker inaktif bersaldo berubah menjadi satker inaktif tidak bersaldo.
9. Jadwal rekonsiliasi eksternal dan penyampaian Laporan Keuangan bulan Desember 2020 (Tahunan *Unaudited*) akan diatur lebih lanjut.
10. Selain melaksanakan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA/satker dengan KPPN, satker juga melaksanakan pengisian data capaian output untuk dilakukan proses konfirmasi oleh KPPN pada *open period* pertama rekonsiliasi Laporan Keuangan.
11. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B E-1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
12. Pertanyaan atau permintaan informasi melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN pada *website* [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id) dapat disampaikan dalam hal terdapat permasalahan penggunaan aplikasi e-Rekon&LK.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran





LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-689 /PB/2020

Tanggal : 18 Agustus 2020

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Kementerian Pariwisata RI
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional RI
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

No.	Kementerian Negara/Lembaga
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila